



Received: 23 Mei 2025

Reviewed: 12 Juni 2025

Published: 7 Juli 2025

SUSTAINING INDONESIAN NATIONAL COHESION AND THE DELIBERATIVE DEMOCRACY OF SEA PEOPLES' CHRISTIANITY

MERAWAT KEUTUHAN KEBANGSAAN INDONESIA DAN DEMOKRASI DELIBERATIF KEKRISTENAN ORANG LAUT

Pdt. Prof. Dr. Julianus Mojau, M.Th.¹
Universitas Halmahera

ABSTRACT

This article critically examines the sociopolitical and theological contributions of Indonesia's sea peoples, particularly the Talaud community, to the preservation of national cohesion through the framework of deliberative democracy. Drawing on democratic practices embedded in maritime culture and the contextual theology of the Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA), the study demonstrates how indigenous meritocratic leadership, participatory decision-making, and relational ethics form a

¹ Julianus Mojau adalah Guru Besar Teologi Sosial pada Fakultas Teologi Universitas Halmahera (UNIERA). Beliau adalah Pendeta Gereja Masehi Injili Halmahera. Pernah menjadi Rektor UNIERA juga pengurus Perhimpunan Sekolah-sekolah Tinggi Teologi di Indonesia (PERSETIA). Dalam lingkup Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), beliau pernah melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja (SE KPG) dan Anggota Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI periode 2019-2024.

substantive alternative to the procedural and populist drift of Indonesia's contemporary democratic landscape. Anchored in the local philosophy of *sansiotte sampate-pate*, a maritime ethic of synchronized collective action, the paper articulates a model of deliberative democracy grounded in inclusivity, egalitarianism, and social justice. Furthermore, it analyzes the theological position of the Indonesian Ecumenical Christian movement, which affirms the Indonesian nation-state and the Pancasila ideology as manifestations of divine grace, thereby linking religious identity to emancipatory nationalism. The study contends that the deliberative ethos of the sea peoples provides an ethically grounded political framework capable of countering the instrumentalization of democratic procedures by populist demagogues, while revitalizing the symbolic values of Pancasila into actionable and justice-oriented public policy. In doing so, it offers a constructive contribution to contemporary discourse on democracy, pluralism, and nationhood in the Global South.

Keywords: Deliberative democracy; maritime political culture; Indonesian nationalism; GERMITA; Pancasila; social theology

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kontribusi sosial-politik dan teologis orang laut di Indonesia, khususnya masyarakat Talaud, dalam merawat keutuhan nasional melalui kerangka demokrasi deliberatif. Dengan merujuk pada praktik demokrasi yang terinternalisasi dalam budaya maritim serta teologi kontekstual Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA), studi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan meritokratis, pengambilan keputusan partisipatif, dan etika relasional yang tumbuh dari kearifan lokal membentuk alternatif substantif terhadap kecenderungan demokrasi Indonesia kontemporer yang semakin prosedural dan populis. Berlandaskan pada falsafah lokal *sansiotte sampate-pate*, sebuah etika maritim tentang tindakan kolektif yang terkoordinasi, artikel ini mengartikulasikan model demokrasi deliberatif yang berakar pada inklusivitas, egalitarianisme, dan keadilan sosial. Lebih jauh, tulisan ini juga mengeksplorasi posisi teologis Gerakan Oikumenis Kekristenan Indonesia yang menegaskan bahwa negara Indonesia beserta ideologi Pancasila adalah manifestasi dari anugerah ilahi, yang menghubungkan identitas religius dengan nasionalisme yang emansipatoris. Studi ini berargumen bahwa etos demokrasi deliberatif orang laut menawarkan kerangka etik-politik yang kuat untuk menandingi instrumentalisasi prosedur demokrasi oleh demagog populis, sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai simbolik Pancasila menjadi kebijakan publik yang nyata. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi konstruktif terhadap wacana demokrasi, pluralisme, dan kebangsaan di kawasan *Global South*.

Kata-kata Kunci: *Demokrasi deliberatif; budaya politik maritim; nasionalisme Indonesia; GERMITA; Pancasila; teologi sosial*

PENDAHULUAN

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 lalu, saya mendapat kesempatan untuk berbagi perspektif dalam *study meeting* pada Sidang Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA) pada 21 November 2023 tentang bagaimana merawat keutuhan bangsa Indonesia di tengah-tengah semakin memanasnya politik kekuasaan di Indonesia. Ketika saya memutuskan untuk

mempertimbangkan perspektif orang laut sebagai cara membaca dan bagaimana merawat keutuhan bangsa Indonesia di tengah-tengah politik kekuasaan di Indonesia yang suka menyebarkan rasa takut sebagai strategi mengendalikan rasa takut rakyat Indonesia sehingga mereka dapat dimobilisasi untuk kepentingan politik elektoral. Pilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan ini. *Pertama*, masih jarang orang-orang Indonesia memberi perhatian pada pengalaman berdemokrasi orang laut dalam membangun kehidupan bersama berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. *Kedua*, orang laut bukanlah bajak laut sebagaimana sering dipersepsikan dan bahkan dicatat dalam sejarah orang laut. *Ketiga*, menarik GERMITA sebagai gereja yang akrab dengan budaya orang laut itu memilih *logo* GERMITA menyatukan simbol-simbol Kristen dengan bendera Indonesia.

Tulisan ini merupakan pengembangan dari materi *study meeting* tersebut. Oleh karena itu, pola penulisan tidak sepenuhnya mengikuti kaidah penulisan ilmiah; melainkan lebih merupakan beberapa pertimbangan untuk pengembangan demokrasi deliberatif berdasarkan perspektif orang laut. Saya berpendapat bahwa pengalaman berdemokrasi orang laut sebagaimana nyata dalam praktik berdemokrasi orang-orang Talaud memberi pesan sosiologis dan antropologis yang patut dipertimbangkan untuk merawat keutuhan bangsa Indonesia dengan pengembangan demokrasi deliberatif. Saya memutuskan mempublikasikan materi *study-meeting* ini sebagai pemantik pengembangan berteologi sosial dan politik dalam rangka pengembangan demokrasi Indonesia untuk merawat keutuhan kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia.

Moralitas Keutuhan Kebangsaan Masyarakat Majemuk Indonesia

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebelum awal abad ke-20 di wilayah Pemerintahan Hindia Belanda saat itu telah ada sejumlah negara-bangsa dalam bentuk Kerajaan-Kerajaan dengan dinamika dan pola relasi dengan Pemerintah Hindia Belanda tersendiri. Memasuki awal abad ke-20 — terutama setelah Sumpah Pemuda tahun 1928 — kebangsaan negara-bangsa sebelum Indonesia itu tidak pada konsensus kebangsaan *emansipatoris-etis* yang dilandasi oleh kesenasiban untuk meraih martabat kemanusiaan rakyat Indonesia di Hindia Belanda yang *setara* dan *adil* dalam kehidupan sehari-hari (Mochtar Pabottingi, 2023; Frans Magnis-Suseno, 2008; A. Sudiardja, 2001). Moralitas kesetaraan dan keadilan itulah yang mengkristal dalam Prklamasi Kemerdekaan Indonesia secara politis pada 17 Agustus 1945 yang dinyatakan dalam **Pembukaan UUD 1945** sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka *penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan*.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh *keinginan luhur*, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Di sini jelas bahwa keutuhan kebangsaan adalah kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia dibangun atas dasar mooralitas kebangsaan di mana *tidak boleh ada penjajahan dalam bentuk* apapun karena hal tersebut bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kebangsaan masyarakat majemuk humanis-etis ini perlu dirawat melalui kehidupan bernegara berdasarkan hukum yang mengakui kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hukum yang menata keadaban publik, hukum yang menata agar kebersatuan sesama warga negara-bangsa Indonesia tetap terjaga, hukum yang menata proses-proses demokrasi Indonesia yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi deliberatif yang

menghasilkan konsensus kebangsaan Indonesia tetap terawat, dan hukum yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial antar sesama warga bangsa Indonesia dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Maka secara filosofis dan norma etis (baik juridis maupun kultural) **keutuhan kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia** dalam Negara Hukum Republik (*Res Publica*) Indonesia itu **diikat** oleh **kebangsaan emansipatoris-etis** lahir dari rahim kesetaraan dan keadilan kemanusiaan universal kebangsaan etnisitas (*ethnonationalism*) dan kebangsaan keagamaan (*religious nationalism*) dari bangsa-bangsa dan negara-bangsa yang berbeda di wilayah Pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Dalam pengertian ini maka keutuhan kebangsaan masyarakat majemuk hanya dapat dipertahankan sejauh nilai-nilai Pancasila sebagai *symbolic values* kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia itu menjadi *material values* dalam tata kenegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila itu. Suatu tata kenegaraan dan pemerintahan yang tidak anti pada perbedaan aspirasi politik dan ekonomi karena perbedaan suku-bangsa, agama dan budaya serta ideologi politik (Julianus Mojau, 2023).

Sidang Raya XVII PGI (2019) dan Sidang Raya XVIII PGI (2024) mencatat bahwa negara-bangsa Indonesia di awal abad ke-21 sedang berada dalam *krisis kebangsaan*. Krisis kebangsaan itu boleh jadi sangat terkait dengan tata kenegaraan dan pemerintahan Indonesia yang belum mampu mewujudkan *symbolic values* Pancasila menjadi *material values* dalam kehidupan sehari-hari yang nyata dari kebijakan publik seperti dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Merajalelanya korupsi di sejumlah lembaga-lembaga publik di Indonesia hari-hari ini memperlihatkan bahwa *symbolic values* Pancasila masih tindak menjadi ideologi kebangsaan yang bersifat utopis dan belum berdaya liberatif dan transformatif dalam memungkinkan *kesetaraan* dan *keadilan* itu menjadi *habitus* kenegaraan dan pemerintahan negara-bangsa Indonesia.

Kebangsaan Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia

Sejak didirikan tahun 1950 Gerakan Oikoumene Gereja-gereja di Indonesia dengan nama Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) dan yang berubah nama menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) teguh dan tegar merawat kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia berdasarkan *symbolic values* Pancasila. Sejumlah dokumen teologis sosial politis yang dihasilkan dari tahun 1950-an hingga Sidang Raya XVIII DGI/PGI (2024) memperlihatkan begitu kuat teguh komitmen-teologis Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia terhadap kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia yang diikat oleh moralitas sosial keindonesiaan Pancasila. Karena itu, sepertinya dari **Pernyataan Iman** Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (Pernyataan Iman PGI) sejak Sidang Raya XVII DGI/PGI (2019), Gerakan Oikoumene Gereja-gereja di Indonesia akhirnya tiba pada pernyataan iman sosial keindonesiaan tentang kemerdekaan Indonesia sebagai perwujudan *kebangsaan emansipatoris-etis* masyarakat majemuk Indonesia sebagaimana dinyatakan saat proklamasi kemerdekaan politis 17 Agustus 1945 dan dikonkretkan dalam tata kehidupan sosial Indonesia merdeka seperti terdapat dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 di atas. Dalam iman kepada **karya Allah Trinitas** Gerakan Oikoumene Gereja-gereja di Indonesia menyatakan *iman sosial keindonesiaan* tentang *sejarah sosial Indonesia merdeka* sebagai karya penciptaan dan anugerah Allah. Sidang Raya XVIII (2024) dengan memberi tekanan pada **paradigma Trinitas iman Kristen** menyatakan keyakinan teologis dan komitmen teologis sosial politis Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia itu sebagai berikut:

Kami, Gereja-gereja di Indonesia mengaku, bahwa Allah Trinitas,
Bapa, Anak dan Roh Kudus bekerja di tengah dunia untuk

Julianus Mojau Merawat Keutuhan Kebangsaan Indonesia

mencipta, memelihara, menyelamatkan dan membaharui manusia dan seluruh alam semesta. Di dalam Kristus, Allah menebus seluruh ciptaan-Nya dari dosa, dan melalui kuasa Roh Kudus-Nya Allah memanggil, mempersatukan, dan memberdayakan umat-Nya untuk menjadi saksi Injil Kerajaan Allah di dalam dunia, melalui persekutuan kasih, perjuangan keadilan dan pelayanan perdamaian, kesejahteraan, serta keutuhan ciptaan, sambil menantikan penggenapan Kerajaan Allah ketika Tuhan Yesus datang kembali.

Kami, Gereja-gereja di Indonesia mengaku, bahwa bangsa dan negara Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, juga merupakan karya dan karunia Allah Trinitas, sebagai bagian dari pemeliharaan Allah melalui bangsa-bangsa, dengan tujuan menegakkan keadilan hukum, dan mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, serta keutuhan ciptaan, sesuai kehendak-Nya. Gereja-gereja di Indonesia lahir dari rahim sejarah bangsa Indonesia dan merupakan karya Roh Kudus untuk menjalankan panggilan persekutuan, pemberitaan Injil, dan pelayanan sosial-ekologis dalam konteks kemajemukan agama dan budaya masyarakat Indonesia.

Kami, Gereja-gereja di Indonesia menyadari, bahwa Gereja-gereja di Indonesia dipanggil menjadi berkat bagi bangsa Indonesia dan turut memikul tanggung jawab dengan berpartisipasi secara positif, kreatif, dan realistis, dengan tetap berpengharapan demi transformasi menuju masyarakat yang adil dan beradab.²

Keyakinan teologis dan komitmen teologis sosial politis yang membentuk iman sosial keindonesiaan Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia di atas lahir dari pandangan dan penilaian teologis tentang *sejarah sosial* Indonesia merdeka tidaklah bertentangan dengan moralitas kebangsaan emansipatoris-etis masyarakat majemuk Indonesia. Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia memiliki keyakinan teologis bahwa identitas dan rasa kebangsaan emansipatoris etis Indonesia itu mencerminkan identitas dan rasa kemanusiaan universal. Pengertian kebangsaan Indonesia seperti inilah maka Kekristenan Indonesia memahami secara teologis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 termasuk dalam karya penciptaan (*ordo creatio*) dan karya penyelamatan (*ordo salutis*) dari Allah Trinitas: Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu pula, bagi Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia, sejarah sosial kebangsaan emansipatoris Indonesia merdeka/modern yang ditata dalam Negara Hukum Republik Indonesia berdasarkan moralitas sosial dan hukum Pancasila adalah Anugrah Tuhan Allah sendiri (*ordo gratia*).

Orang Laut, Bukan Bajak Laut

² DKG PGI 2024-2029 (e-book), 49. Ada perbedaan pengorganisasian PBIK sebagaimana tertuang dalam DKG 2019-2024, 1-2.

Adrian B. Lopian dalam bukunya, *Orang Laut, Bajak Laut dan Raja Laut* (2009), mencatat bahwa penduduk pribumi di Kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan masyarakat laut (*the sea-society*) adalah serumpun dari segi bahasa dan kebudayaan. Hanya terdapat perbedaan dialek saja antara dialek Talaud, Manganitu, dan Siau. Oleh karena itu, Lopian juga mencatat bahwa, penduduk pribumi di Kepulauan Sangihe-Talaud, adalah satu suku-bangsa (Adrian B. Lopian, 2009: 53).

Menurut Adrian B. Lopian, dibandingkan dengan orang laut di daerah lain di Sulawesi Utara, orang laut di Kepulauan Sangihe-Talaud lebih maju kebudayaan maritimnya. Hal ini ditandai oleh jenis perahu dan bahkan memiliki perbendaharaan kata yang kaya untuk penyebutan navigasi dan perkapalan serta memiliki penyebutan yang amat terinci untuk menyebut bagian-bagian perahu. Misalnya: cadik penopang keseimbangan bodi perahu di laut (*sahemmang*) disebut: “*bahatang*” untuk bagian haluan dan “*tari*” untuk bagian buritan. Lunas perahu bagian luar disebut: “*unaeng*” dan bagian dalam disebut: “*taghuvula*”. Bahkan mereka juga memiliki pengertian “*laut*” dengan macam-macam penyebutan. Laut pada umumnya diberi nama: “*laude*” (Sasahara: “*boba*”, “*taghaloang*”) dan permukaan laut disebut: “*sas*” (Sasahara: “*badoa*”). Juga untuk dasar laut ada macam-macam penyebutan: “*ellie*” untuk dasar laut pada umumnya; “*bëndasè*” untuk dasar laut putih; “*bënda*” untuk dasar laut yang tidak terlalu dalam dan “*inabè*” untuk dasar laut yang tak terlihat lagi (Ibid: 60-61).

Selanjutnya Adrian B. Lopian menyebutkan bahwa orang laut di Laut Utara Sulawesi sebagai masyarakat nomaden (*the sea-nomadic-society*) semakin terdesak setelah berjumpa dengan kelompok *Bajak Laut* dan *Raja Laut*. Bajak Laut dapat ditemukan dalam usaha sekelompok pembajak di perairan Laut Utara Sulawesi untuk memperoleh sumber kehidupan secara ekonomi. Raja Laut dapat ditemukan dalam bentuk sistem kekuasaan raja-raja pra-Indonesia dan bangsa Portugis dan Belanda untuk yang menjadikan Laut Utara Sulawesi sebagai lalu lintas perdagangan sekaligus menaklukkan dan menguasai sumber-sumber ekonomi pada jalur Pasifik. Bajak Laut dan Raja Laut kadang saling memanfaatkan untuk menaklukkan dan menguasai pihak yang berbeda dari kelompok mereka. Siapa yang kuat sumber daya ekonomi dan kekuatan militer akan dapat menguasai yang lain. Relasi antar-kelompok berbeda adalah pola relasi persaingan (*competitiveness-relation*). Bahkan saat tertentu, para Raja Laut dan Bajak Laut, bisa saling bersaing dan saling menaklukkan satu terhadap yang lain. Dalam konteks seperti ini orang laut tidak jarang dimanfaatkan oleh kedua kelompok kekuasaan yang bersifat *despotism* dan *oligarkhial* itu. Maka dari itu, dalam sejarah sosial dan pemerintahan pra-Indonesia, selalu berkelindannya ketiga budaya penataan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan (Adrian B. Lopian, 2009:97-231).

Orang laut sebagai masyarakat nomaden (*the sea-nomadic-society*) sangat mengedepankan kebebasan dan selalu berpindah-pindah. Setiap keluarga batih memiliki perahu sebagai rumah mereka. Secara sosial mereka pada umumnya biasa terdiri dari beberapa rumah-perahu saling menopang kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga diikat oleh saling percaya satu dengan yang lain dan tidak boleh saling melukai atau saling merugikan hidup bersama di sebuah pelabuhan dekat daratan/pantai/pesisir pantai. Mereka juga selalu merundingkan kepentingan-kepentingan mereka yang berbeda untuk menegosiasikan kepentingan berbeda itu. Mereka juga punya karakter lebih fleksibel dengan ikatan kekeluargaan dan asosiasi kehidupan bersama yang partisipatoris sekaligus longgar alias tidak ada ikatan yang permanen-kaku (Adrian B. Lopian, 2009:91-93).

Jika terjadi saling melukai atau salah satu kelompok sosial dalam bentuk keluarga batih tertentu melukai dan ingin selalu menguasainya maka keluarga batih lain akan mencari pelabuhan lain untuk melabuhkan kehidupan sehari-hari setelah aktivitas melaut dan/atau mengusahakan penopang hidup sehari-hari di darat pesisir pantai. Maka dapat dikatakan bahwa budaya orang laut begitu *cair, fleksibel*,

negosiatif dan mengutamakan keahlian yang mumpuni untuk mengurus kehidupan bersama. Mereka tidak memiliki pandangan dunia (*kosmologi/world-view*) saling menaklukkan. Mereka lebih memiliki jiwa dan semangat bekerjasama (*cooperativeness*) ketimbang memiliki jiwa dan semangat saling bersaing (*compositeness*). Di sini jelas ada perbedaan antara *orang laut* dari *bajak laut* dan *raja laut*. Orang laut memiliki budaya yang cair dan bersifat *negosiatif* dan bukan berbudaya penaklukan seperti budaya bajak laut dan raja laut.

Dari segi kepemimpinan mereka sangat mengedepankan prinsip *meritokrasi*. Oleh karena itu, sekalipun mereka mengharapkan pemimpin mereka secara ideal berdasarkan pada garis keturunan; namun dalam praktik ada segi-segi lain yang lebih menentukan pemilihan seorang pemimpin. Mereka lebih mengutamakan sifat kepemimpinan dan soal kebijaksanaan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Tidak mengedepankan persaingan untuk saling meniadakan melainkan melalui *konsensus* dengan *uji-kepatutan* berdasarkan *prinsip kompetensi*. Jadi, ada asas “*meritokrasi*” dan “*demokrasi deliberatif*” (bdk. Adrian B. Lopian, *ibid*: 93-96; Arif Satria, dkk., 2017:109-202). Karena, sebagai orang-orang laut, laut adalah rumah kehidupan sekaligus ruang saling memberi kehidupan antarmanusia dan antarmanusia dengan lingkungan laut (Paul D’arcy, 2008).

Kebangsaan Kekristenan Orang Laut dalam Wujud GERMITA

Kekristenan yang bertemu dengan Orang Laut (Talaud) di Samudra Pasifik Laut Utara Sulawesi adalah Kekristenan Katolik Roma Portugis Abad XVI dan Kekristenan Calvinis Belanda Abad XIX (Th. van den End & J. Weitjens, SJ., 2014:143-144; D. Brilman, 2000:120-149). Tetapi Kekristenan Calvinis Belandalah yang memiliki interaksi paling intensif dengan masyarakat Sangihe-Talaud. Khusus di Kepulauan Talaud kekristenan Calvinis Belanda bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat Talaud yang telah mengenal tatanan masyarakat kerajaan. Saya tidak mempunyai data yang memadai untuk menjelaskan pembentukan masyarakat Kerajaan Talaud. Apakah hal ini terkait dengan persentuhan intensif antarsesama orang laut di Samudra Pasifik? Pada saat itu (abad ke-16 sampai abad ke-19) telah ada beberapa kerajaan di Sulawesi (baik Selatan maupun Utara). Satu hal yang pasti ialah penerimaan kekristenan Calvinis di Talaud melalui proses negosiasi yang tidak gampang. Selain faktor ekonomi para utusan NZG, juga ada faktor sosial-budaya masyarakat Talaud. Negosiasi penerimaan kekristenan Calvinis yang dibawa oleh Zendeling Tukang *Nederlandsch Zendinggenootschap* (NZG) itu seperti nyata dari pernikahan seorang utusan NZG (W. Richter) dengan seorang gadis Talaud, putri raja Sariu (Carolina) di Beo. Sejak itu penerimaan orang-orang pribumi terhadap para Zendeling lebih terbuka dan pelibatan orang-orang pribumi dalam pekerjaan Pekabaran Injil pun terbuka (D. Brilman, 2000:176-150).

Perjumpaan kepribadian orang-orang laut di Utara Sulawesi di Laut Samudra Pasifik dan kepribadian Kristiani orang-orang kontinental dari daratan Eropa (Belanda) telah membawa perkembangan pesat kekristenan orang laut di pulau-pulau Talaud melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan (D. Brilman, 2000:151-283). Kekristenan orang laut di pulau-pulau Talaud inilah yang sekarang kita mengenalnya dalam wujud Sinode Gereja Masehi Injili Talaud (GERMITA). Sebagaimana nama dari Sinode ini maka kekristenan dalam wujud Sinode GERMITA adalah kekristenan orang laut. Dan ini sesuai dengan nama “Talaud” yang disematkan pada “identitas eklesial” kekristenan hasil perjumpaan orang-orang laut di bibir Pasifik ini dengan kekristenan kontinental dari daratan Eropa (Arnold Apolos Abbas, tt., 66-70).

Julianus Mojau
Merawat Keutuhan Kebangsaan Indonesia

Menarik bahwa kekristenan Talaud (Orang Laut) dalam wujud Sinode GERMITA itu begitu kuat mengintegrasikan kepribadian Kristennya dengan kepribadian keindonesiaannya sebagaimana nyata dalam logo GERMITA sebagai berikut:



Dalam Tata Gereja GERMITA 2021 dijelaskan hubungan antara identitas kekristenan dan identitas kebangsaan Indonesia GERMITA sebagai berikut:

“Pita GERMITA dengan warna merah-putih di bagian kiri dan kanannya, mengungkapkan pengakuan nasionalisme GERMITA bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia dalam segala keberagamannya adalah karunia dan medan pekerjaan Allah. Karena itu, GERMITA dipanggil berkarya dan turut bertanggungjawab atas kesejahteraan, keadilan dan kesentosaan bangsa dan negara Indonesia” (Tata Gereja GERMITA, Bab VIII, pasal 22, ayat 3e).

Okrisye Lantaka menilai bahwa imajinasi terintegrasinya identitas kebangsaan Indonesia dan identitas kekristenan orang-orang Talaud ini masih perlu upaya serius agar dapat terinternalisasi dengan baik di kalangan warga Jemaat GERMITA. Khusus yang di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina. Ia menyebutkan insiden pengibaran bendera Filipina di desa Riung yang berbatasan dengan Filipina. Argumen mereka ialah kedekatan mereka dengan orang-orang Filipina. Dengan temuan seperti ini Lantaka menyimpulkan bahwa imajinasi kebangsaan Indonesia kekristenan Talaud dalam wujud Sinode GERMITA melalui logo GERMITA masih lebih merupakan imajinasi kelembagaan Sinode GERMITA. Belum begitu terinternalisasi dengan mendalam di kalangan warga Jemaat di wilayah perbatasan Indonesia (Okrisye Lantaka, 2023).

Terlepas dari catatan pengingat yang diperlihatkan oleh Lantaka berdasarkan penelitian lapangannya kita perlu mengapresiasi penyatuan identitas kebangsaan Indonesia dengan identitas kekristenan orang-orang laut di pulau-pulau Talaud itu. Jika benar argumen mereka yang menaikkan bendera Filipina di Riung seperti disinyalir oleh Lantaka, maka boleh jadi argumen mereka itu mencerminkan kepribadian dan karakter orang-orang laut yang terbuka pada ruang yang berbeda dan asing bagi mereka. Mereka memiliki imajinasi tentang ruang hidup yang selalu terbuka pada ruang kehidupan yang berbeda (*beteroutopia*). Sebagai orang-orang laut (bukan bajak laut atau raja laut) mereka tidak memiliki psikologi dan mentalitas untuk menaklukkan orang lain yang berbeda. Psikologi dan mentalitas mereka seluas Laut Samudra Pasifik. Psikologi dan mentalitas mereka inklusif dan merangkul perbedaan bagi kehidupan yang harmonis sebagai sesama manusia dengan martabat kemanusiaan yang perlu dihormati. Oleh karena itu, mereka tidak punya rasa takut pada perbedaan identitas kebangsaan. Karena identitas kebangsaan itu sangat terkait dengan *praxis* kehidupan sehari-hari (bdk. Chryssanthi Papadopoulou, 2019).

Imajinasi kebangsaan kekristenan Indonesia di kepulauan Talaud bukanlah identitas kebangsaan berparadigma daratan-kontinental bersifat teritorial dengan ruang lingkup terbatas melainkan imajinasi kebangsaan kekristenan Talaud boleh jadi berparadigma identitas kebangsaan laut biru Indonesia seluas Laut Samudra Pasifik. Oleh karena itu, hati, pikiran dan tindakan kebangsaan mereka selalu seluas lautan yang membiru itu. Kepribadian dan mentalitas kebangsaan Indonesia yang tidak berkepribadian dan bermentalitas “blok-merah”; melainkan kepribadian dan mentalitas kebangsaan Indonesia inklusif, seinklusif lautan Samudra-Pasifik. Kepribadian dan mentalitas kebangsaan inklusif-biru. Suatu identitas kebangsaan *relasional-inklusif dan komunikatif-dialogis* yang menghargai dan menghormati kebebasan dalam kesetaraan, kesejahteraan dan kedamaian dalam keadilan!

Suatu strategi merawat keutuhan kebangsaan emansipatoris etis Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 bukan dengan strategi berdarah-darah melainkan dengan strategi lautan-biru sebagai jembatan kemanusiaan. Strategi keberanian membangun komunikasi dan dialog kehidupan dengan mereka yang berbeda demi untuk kehidupan sehari yang berkecukupan secara ekonomi. Kultur ekonomi politik lautan biru adalah kultur ekonomi politik kehidupan bersama antarsesama manusia. Suatu strategi merawat keutuhan kebangsaan Indonesia dengan selalu merayakan keluasan ruang hidup bagi siapapun yang melampaui batas-batas identitas kesuku-bangsaan dan keagamaan serta ideologi politik dan ekonomi. Suatu identitas kebangsaan inklusif dan relasional yang selalu merayakan kebebasan dalam kesetaraan, kesejahteraan dan kedamaian dalam keadilan seluas hati, pikiran dan tindakan kemaritiman lautan Samudra Pasifik Allah Tritunggal: Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus (bdk. Julianus Mojau, 2014). Suatu kesadaran dan tindakan merawat keutuhan bangsa Indonesia yang tidak jatuh ke dalam identitas kebangsaan *sauvinis* yang berdarah-darah meniadakan mereka yang berbeda identitas kebangsaan dengan identitas kebangsaan Indonesia (Daniel Dhakidae, 2001; Julianus Mojau, 2019).

Demokrasi Deliberatif Kekristenan Orang Laut

Menarik bahwa penyatuan identitas ini diletakkan dalam kaitan dengan panggilan dan tanggungjawab GERMITA menegakkan kesejahteraan, keadilan dan kesentosaan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Suatu penyatuan yang didasarkan pada panggilan dan tanggungjawab etis mengusahakan dan menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan kesentosaan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia itu dipandu oleh spiritualitas orang-orang Talaud: “*sansiotte sampate-pate*”. Frase ini terdiri dari kata “*sansiotte*”; yang berarti: “*bergerak bersama-sama*” untuk menurunkan perahu ke laut dan kata berulang “*sampate-pate*”; yang artinya: “*sama-sama berhenti*” untuk menaikkan perahu ke darat. Frase ini hendak menjadi spirit bekerja sama agar tercipta “*keseimbangan badan perahu*” yang ditopang oleh *kesebatian* dan *kesepeikiran* dalam kasih untuk mencapai tujuan sehingga tidak jatuh dan menimpa sesama partisipan dalam berpikir dan bertindak bersama itu.³

Menarik juga bahwa Sinode GERMITA menghubungkan filosofi dan pandangan hidup “*sansiotte sampate-pate*” orang Talaud ini dengan filosofi dan pandangan hidup Jemaat di Filipi sebagaimana dicatat dalam teks Filipi 2:2-3: ... “*karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri*” (lihat Pembukaan Tata Gereja GERMITA tahun 2021 dan Bab VIII, pasal 22 ayat 3d). Kita dapat menafsirkan bahwa melalui teks ini Sinode GERMITA hendak menegaskan — seperti ungkapan “*sansiotte sampate-pate*” — perlunya keseimbangan hati dan pikiran serta tindakan. Keseimbangan itu akan terjadi ketika sesama pekerja itu tidak saling mendominasi atau saling menguasai melainkan saling memberi ruang partisipasi dalam semangat kesetaraan. Tidak ada tuan dan hamba! Karena semua pihak

³ Wawancara Pdt. Dr. Arnold A. Abbas, Ketua Umum Sinode GERMITA via *Whatsapp Video Call*.

adalah sesama pekary yang hati, pikiran dan tindakannya disatukan oleh kasih untuk menjaga “*keseimbangan badan perahu*” agar tidak jatuh dan pecah!

Sejatinnya, melalui filosofi dan pandangan hidup “*sansiotte sampate-pate*” orang Talaud dan kesaksian Alkitab Filipi 2:2-3, kita dapat belajar insentif teologis tentang *mentalitas* dan *kepribadian* dalam berdemokrasi deliberatif orang laut. Kepribadian berdemokrasi yang berakar di dalam hati, pikiran dan tindakan yang mengutamakan keutuhan hati, pikiran, dan tindakan untuk menegakkan badan perahu kehidupan bersama (tubuh sosial) berdasarkan moralitas sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dalam kesetaraan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam keadilan. Kepribadian berdemokrasi ini menegaskan kedaulatan rakyat orang per orang dan/atau kelompok orang bukanlah untuk menciptakan *chaos* dan *anarkis sosial* sehingga dapat menyebabkan pecahannya badan perahu kehidupan bersama (disintegrasi bangsa) melainkan tetap menegakkan badan perahu kehidupan (tubuh sosial) agar tercipta dan/atau menghasilkan *kesejahteraan* dan *kedamaian* hidup bersama melalui keutuhan perahu kehidupan bersama itu.

Kita telah mencatat sebelumnya bahwa sejarah sosial kebangsaan Indonesia setelah Proklamasi masyarakat majemuk Indonesia Merdeka adalah keutuhan kebangsaan emansipatoris-etis yang ditata berdasarkan pada prinsip-prinsip Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dengan moralitas hukum kenegaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bersama (5K). Maka sejak itu kebangsaan Indonesia, pun diikat oleh ikatan imperatif-etis 5K. Dengan demikian keutuhan kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia sangat terkait dengan tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia dengan moralitas hukum Pancasila bersendikan 5K tersebut. Tanpa itu maka kebangsaan Indonesia kehilangan daya emansipatoris dari *spiritualitas historis* dan *daya emansipasi sosiologis-antropologis* kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia mereka sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan dihayati oleh Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia dalam bentuk iman sosial emansipatoris keindonesiaan itu.

Demokrasi deliberatif Kekristenan Orang Laut (Talaud) mengilustrasikan dengan baik bahwa proses berdemokrasi haruslah bertumpu pada kepribadian baik individu maupun kelompok yang mampu mengonsolidasikan perbedaan aspirasi politik dan ekonomi menjadi *aspirasi politik dan ekonomi yang saling mengemansipasi* antarsesama warga bangsa Indonesia dengan meragakan moralitas hukum Negara Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mentalitas dan kepribadian berdemokrasi seperti ini akan selalu mengedepankan penalaran hati, penalaran pikiran, dan penalaran bertindak yang membuat *ruang publik masyarakat majemuk Indonesia* sungguh-sungguh menjadi *ruang menegosiasikan dan mengomunikasikan perbedaan aspirasi* yang bermuara pada saling memberi ruang ekspresi perbedaan potensi masyarakat majemuk Indonesia. Di sini politik lalu menjadi kearifan menatalayani ruang publik masyarakat majemuk Indonesia menjadi ruang kehidupan bersama yang damai dan sejahtera: lahir dan batin! Politik bukanlah sekadar strategi merebut kekuasaan politik dan ekonomi untuk menghegemoni sesama warga bangsa dan negara Indonesia; melainkan kearifan berkomunikasi dan bernegosiasi yang didasarkan moralitas hukum 5K itu (bdk. Julianus Mojau, 2022:93-97).

Di sini kesetaraan dan keseimbangan/keadilan adalah sauh/jangkar perahu atau sauh/akar bahar kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia. Dengan sauh/akar bahar kesetaraan dan keseimbangan maka proses demokrasi sebagai proses warga bangsa Indonesia mengomunikasikan dan menegosiasikan perbedaan kepentingan itu tidak akan membuat *iritasi mata hati sosial keindonesiaan* sehingga *buta* terhadap *bahaya ketidakseimbangan* badan perahu kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia. Demokrasi tanpa kesetaraan dan keseimbangan/keadilan sebagai moralitas hukum akan membuat demokrasi kehilangan kedalamannya/substansinya. Demokrasi yang dipandu oleh moralitas hukum kesetaraan dan keseimbangan/keadilan akan membuat demokrasi itu menjadi *kecakapan* dan *seni* melatih penalaran hati, penalaran pikiran, dan ketepatan bertindak dalam merawat keutuhan kebangsaan masyarakat majemuk Indonesia menjadi keutuhan kebangsaan emansipatoris-etis di

tengah-tengah globalisasi demokrasi populisme dengan mengabaikan *symbolic values* Pancasila atau membuat *symbolic values* Pancasila sekadar senjata untuk membungkam pandangan dan sikap kritis rakyat Indonesia ketika *symbolic values* Pancasila tidak menjadi *material values* dalam kebijakan politik dan ekonomi Negara dan Pemerintah Indonesia.

Jika kita memperhatikan gerakan populisme di berbagai negara maka kita perlu kritis terhadap demokrasi prosedural yang dikendalikan oleh politik populisme yang sekarang ini sedang berkembang di Indonesia. Karena demokrasi prosedural dapat dibajak oleh para demagog politik machiavelian dengan strategi politik kekuasaan yang mengabaikan moralitas dan etika politik. Mereka menyuarakan kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan dan kedamaian hanya untuk merebut suara rakyat untuk mengantar mereka kepada puncak kekuasaan saja (lihat Vedi R. Hadiz, 2018; David C. Legee & Lyman A. Kellstedt, 2006; Bimo Nugroho dan Yamin Panca Setia, 2014; *Tempo* 25 Mei 2025). Kebebasan dalam kesetaraan dan kesejahteraan dan kedamaian dalam keadilan hanya sebagai retorika untuk memompa emosi rakyat untuk memenangkan suara rakyat agar mengantarkan demagog politik pada puncak kekuasaan politik dan ekonomi. Dalam demokrasi populisme seperti ini ada semacam “*cultural-gap*” antara suara rakyat sebagai manifestasi kedaulatan rakyat melalui bilik suara di satu pihak dan praktik kekuasaan politik dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di pihak lain. Inilah tantangan *demokrasi konstitusional* yang sekarang dihadapi oleh banyak negara di dunia (Andrew Arato and Jean L. Cohen, 2022:209-2013).

Menarik dari demokrasi deliberatif orang laut seperti diuraikan sebelumnya ialah proses *demos* (rakyat) menjadi *keratos* (subyek) atau proses kedaulatan rakyat itu sungguh-sungguh dinyatakan secara konkret melalui tindakan bekerjasama (*cooperation*) konkret menciptakan keseimbangan badan perahu (tubuh sosial) dengan dituntun oleh penalaran hati dan penalaran pikiran serta penalaran dalam tindakan dalam mewujudkan kebebasan dalam kesejahteraan dan kesejahteraan dan kedamaian dalam keadilan yang dipimpin oleh seorang pemimpin (*a leader*) yang bukan untuk menguasai orang lain melainkan hanya sebagai pengarah (*to lead*) dan menata (*to manage*) perbedaan agar tercipta *keseimbangan badan perahu kehidupan sosial Indonesia (tubuh sosial keindonesiaan)* di mana perbedaan tidak ditiadakan melainkan diapresiasi sebagai daya-daya emansipatoris bagi keseimbangan tubuh sosial keindonesiaan bagi kesejahteraan bersama (bdk. Jeremiah Morelock (ed), 2021). Imajinasi demokrasi demokrasi orang laut ini menegaskan bahwa proses demokrasi adalah proses kedaulatan rakyat saling memberi ruang kehidupan, sekalipun berbeda, melalui komunikasi dan negosiasi dengan hati dan pikiran yang tertuju pada kesejahteraan dan kedamaian hidup bersama. Perbedaan tidak menghalangi mereka membangun komunikasi dan negosiasi dalam kesetaraan dan membangun kesejahteraan dan kedamaian dalam keadilan dengan saling berbagi ruang kehidupan melalui percakapan dan negosiasi dengan penalaran hati dan pikiran yang berujung pada tindakan bersama mewujudkan kehidupan bersama yang bebas, setara, sejahtera, damai, dan adil (bdk. Winston Halapua, 2008: 54-67).

Jadi, dalam demokrasi deliberatif, seorang pemimpin tidak menyebarkan rasa takut melainkan membesarkan hati rakyat seluas Laut Samudra Pasifik, agar *symbolic-values* (kebebasan dalam kesetaraan dan kesejahteraan dan kedamaian dalam keadilan) itu menjadi *material-values* (kesetaraan antarwarga bangsa dalam praktik, keadilan ekonomi dalam praktik, dan keadilan politik dalam praktik) dalam *praxis* kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Ini hanya mungkin kalau kepemimpinan demokratis itu *berjiva meritokrasi* dan *berjiva pluralis*. Karena hanya kepemimpinan *berjiva meritokrasi* proses-proses berdemokrasi deliberatif Orang Laut (Talaud) akan memekarkan iklim berdemokrasi dengan kebebasan dalam kesetaraan untuk menghasilkan pemilu berkualitas yang mampu menerjemahkan *symbolic-values* Pancasila dalam praxis kehidupan sehari-hari menjadi *material-values* berupa kesejahteraan dan kedamaian dalam keadilan. (Julianus Mojau, 2019, 2023). Inilah sumbangan demokrasi deliberatif orang laut untuk merawat keutuhan kebangsaan emansipatoris etis Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945. Suatu identitas kebangsaan yang menggerakkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara inklusif, pulralis dan dialogis serta tidak takut

pada perbedaan identitas sosial dan kebangsaan dalam konteks masyarakat global sekarang! Memang di sini dibutuhkan otonomi moralitas individu dan sosial. Otonomi moralitas individu dan sosial adalah sauh mutu moralitas proses-proses berdemokrasi deliberatif. Termasuk otonomi moralitas birokrasi dalam pelayanan publiknya (Alois A. Nugroho, 2001).

KESIMPULAN

Kita dapat menyimpulkan bahwa Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia sangat teguh dalam komitmen kebangsaan Indonesia berdasarkan moralitas sosial Indonesia merdeka sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 kita membaca tentang Pancasila adalah *symbolic values* kebangsaan emansipatoris masyarakat majemuk Indonesia merdeka. Dalam pandangan dan penilaian Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia bahwa kebangsaan emansipatoris masyarakat majemuk Indonesia merdeka yang didasarkan pada *symbolic values* Pancasila adalah karya Allah Tritunggal/Trinitas: Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Iman sosial keindonesiaan inilah membuat Kekristenan Gerakan Oikoumene Indonesia menilai bahwa kebangsaan Indonesia sekarang ini sedang dalam krisis disebabkan oleh *symbolic values* Pancasila belum menjadi *material values* dalam kehidupan politik dan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan karena demokrasi Indonesia belum menjadi demokrasi deliberatif yang substansial. Sebagai konsekuensinya demokrasi Indonesia sangat prosedural sehingga dapat dibelokkan oleh para demagog politik populisme yang sedang berkembang hari-hari ini. Dalam hal ini dibutuhkan demokrasi deliberatif substansial di mana rakyat Indonesia dengan segala perbedaannya sebagai kenyataan masyarakat majemuk Indonesia perlu menjadi subyek dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Di sini kita bisa belajar dari praktik demokrasi deliberatif orang laut yang memungkinkan perbedaan menjadi daya-daya emansipatoris antarsesama warga orang laut menjaga keseimbangan badan perahu Indonesia (tubuh sosial masyarakat majemuk Indonesia) selalu dalam keseimbangan yang diikat oleh jangkar/akar bahar kesetaraan, kebebasan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan (5K).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Arnold Apolos (2022). *Rerro Henggonu dan Injil: Studi Perjumpaan Religi Suku Talaud dan Kekristenan di Bibir Pasifik*. Pineleng: PT Percikan Hati.
- Arato, Andrew and Jean L. Cohen (2022). *Populism and Civil Society the Challenge to Constitutional Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Brilman, D (2000). *Kabar Baik di Bibir Pasifik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- D'arcy, Paul (2008). *Of The Sea: Environment, Identity, and History in Oceania*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Dhakkidae, Daniel (2001). "Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-Komunitas Terbang". Pengantar. Dalam Benedic Anderson. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbang*. Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiz, Vedi R (2018). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Jakarta: LP3ES.

- Halupua, Winston (2008). *Waves of God's Embrace: Sacred Perspectives from the Ocean*. Norwich: Canterbury.
- Leege, David C & Lyman A. Kellstedt (2006). *Agama dalam Politik Amerika*. Jakarta: Obor.
- Lantaka, Okrisye (2023). *Imajinasi Keindonesiaan Kekristenan di Perbatasan: Makna Politis Simbol Merah-Putih pada Logo Sinode bagi Nasionalisme Gereja Masehi Injili di Taland* (Abstrak). Tesis Magister Sains Sosiologi Agama. Salatiga: Program Pascasarja Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana (<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/30638>; Diakses 10 November 2023).
- Lapian, Adrian B (2009). *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok-Jakarta: Komunitas Bambu – KITLV-Jakarta.
- Magnis-Suseno, Frans. *Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan: 79 Tahun Sesudah Sumpah Pemuda*. Yogyakarta: Kanisius-Impulse.
- Mojau, Julianus (2019). *Merawat Wajah Keindonesiaan Allah: Pergulatan Iman (Seorang) Protestan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Mojau, Julianus (2022). *Religiositas Kekristenan Halmahera*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Mojau, Julianus (2023). “Teologi Politik Kebangsaan Kekristenan Indonesia”. Materi Kuliah Umum, 4 September 2023, di IAKN Toraja.
- Mojau, Julianus. “Teologi Maritim: Suatu Pergulatan Teologis Bersama Masyarakat Maritim”. Dalam *Berita Oikoumene—Edisi Akhir Tahun 2014*.
- Morelock, Jeremiah (Ed.) (2021). *How to Critique Authoritarian Populism Methodologies of the Frankfurt School*. Leiden and Boston: Brill.
- Nugroho, Alois A (2001). “Otonomi Moral Birokrat dalam Negara Demokrasi: Sebuah Kajian Etika Administrasi Publik”. Dalam Eddy Kristiyanto (Ed). *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta.
- Nugroho, Bimo dan M. Yamin Panca Setia (2014). *Jokowi People Power*. Jakarta: Gramedia.
- Pabottingi, Mochtar (2023). *Nasionalisme dan Egalitarianisme di Indonesia, 1908-1980: Menelaah Masalah-Masalah dalam Diskursus dan Praktik Politik*. Jakarta: Obor.
- Papadopoulou, Chryssanthi (2019). “What we think about when we think about ships: a journey through philosophical metaphors”. In Chryssanthi Papadopoulou (Ed). *The Culture of Ships and Maritime Narratives*. London-New York: Routledge.
- PGI (2020). *Dokumen Keesaan Gereja-gereja di Indonesia 2019-2024*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- PGI (2025). *Dokumen Keesaan Gereja-gereja di Indonesia 2024-2029*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Prisma*, Vol.36, No.3/2017 (Edisi Khusus tentang Populisme).
- Satria, Arif., dkk (Eds/2017). *Laut dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Kompas.
- Sudiardja, A (2001). “Negara Hukum dan “Civil Disobedience”. Dalam Eddy Kristiyanto (Ed). *Etika Politik dalam Konteks Indonesia*. Yogyakarta.
- Tata Gereja GERMITA tahun 2021.
- Tempo 25 Mei 2025.
- van den End, Th & J.Weitjens, SJ (2014). *Ragi Cerita 2: Sejarah Gereja di Indonesia Tahun 1860-an – Sekarang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.